

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Profil Informan

Penelitian menganalisis data primer dari hasil wawancara mendalam dengan 5 informan yang bekerja di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo. Berikut tabel profil informan :

**Tabel 3.1 Profil Informan**

| <b>Informan</b> | <b>Jabatan</b>                |
|-----------------|-------------------------------|
| Informan 1      | Pokja Rehabsos                |
| Informan 2      | Pokja Rehabilitasi            |
| Informan 3      | Pokja Bimbingan               |
| Informan 4      | Pokja Penyantunan dan Rujukan |
| Informan 5      | Staff Tata Usaha Rehabsos     |

#### 3.2. Hasil Penelitian

##### 3.2.1. Peran PPS Mardi Utomo sebagai *Implementor*

##### 3.2.1.1. Implementasi Rehabilitasi yang bersifat Kuratif

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa PPS Mardi Utomo telah menjalankan aspek kuratif dalam rehabilitasi dengan pendekatan yang komprehensif. Aspek kuratif tidak hanya ditujukan untuk mengobati kondisi fisik atau psikologis akibat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga untuk memulihkan fungsi individu secara menyeluruh. Program seperti pelatihan keterampilan (tata boga, pertukangan, dan pengelolaan lahan), bimbingan fisik (senam, olahraga, kerja bakti), serta bimbingan sosial dan mental spiritual merupakan bagian integral dari proses kuratif yang dilakukan. Lebih lanjut, penyediaan bimbingan mental khusus yang menyoroti permasalahan psikososial dan terapi trauma psikologis menegaskan bahwa kurasi yang dilakukan tidak bersifat satu dimensi, melainkan memperhatikan kompleksitas kondisi penerima manfaat. Dengan menggabungkan pemulihan fisik, psikologis, dan spiritual, pendekatan ini bertujuan untuk menguatkan kembali individu baik secara jasmani maupun mental agar para penerima manfaat tidak hanya pulih dari

ketergantungan, tetapi juga siap kembali ke masyarakat dengan jiwa yang lebih bersih dan nilai-nilai keagamaan yang tertanam kuat. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 1 yaitu :

“rehabilitasi dilakukan sudah cukup lengkap, pelatihan ketrampilan tata boga, mengolah lahan, pertukangan kayu, las. Bimbingan fisik termasuk senam, kerja bakti, olahraga dll. Bimbingan sosial individu dan kelompok. Bimbingan mental spiritual, disiplin menjalankan syariat sesuai agama, dan lain-lain. Agar tidak fisiknya kuat dan punya ketrampilan, tapi juga membangun jiwa yang bersih dan beragama dengan baik. Bimbingan mental khusus untuk permasalahan psikososial dan terapi trauma psikologis atau kecanduan narkotik.” (informan 1, 19 Maret 2025)

Rehabilitasi di PPS Mardi Utomo disusun secara terstruktur dan menyeluruh, dengan aktivitas yang dirancang dari pagi hingga malam hari. Setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta penguatan mental dan spiritual para PM. Aktivitas yang terstruktur sejak pagi hingga malam hari menunjukkan bahwa setiap bagian dari program dirancang untuk mendukung proses pemulihan penerima manfaat, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Kegiatan seperti sholat subuh dan mengaji berfungsi sebagai bimbingan spiritual yang menanamkan nilai keagamaan dan memperkuat mentalitas positif. Kedisiplinan dan tanggung jawab ditanamkan melalui apel pagi, olahraga, serta kegiatan menyapu halaman. Selain itu, pelatihan keterampilan yang dibimbing oleh instruktur, serta adanya bimbingan sosial individu maupun kelompok, menandakan bahwa rehabilitasi tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sosial dan psikologis. Bimbingan mental diberikan secara khusus bagi penerima manfaat yang menghadapi permasalahan psikologis, termasuk trauma akibat penyalahgunaan zat. Kebijakan yang memperbolehkan penerima manfaat bekerja di luar panti bagi yang sudah memiliki pekerjaan juga menunjukkan pendekatan yang adaptif dan mendukung reintegrasi sosial secara bertahap. Dengan demikian, pendekatan kuratif di PPS Mardi Utomo tidak hanya bersifat terapeutik, tetapi juga memberdayakan. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 2 yaitu :

“rehabilitasi nya lengkap, dari bangun tidur sampe tidur lagi semua kegiatan ada artinya, mereka harus tertib sholat subuh dan ngaji sebagai bimbingan spiritual, lalu mereka apel olahraga pagi dan menyapu halaman untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, terus ada macam2 pelatihan dan program2 lain, pelatihan ketrampilan macam2 disertai instrukturnya, ada bimbingan sosial berkelompok dan individu, ada bimbingan mental juga untuk yang membutuhkan, semua kegiatan benar-bener berisi dan ada tujuannya, tapi mereka juga boleh keluar panti dan kerja bagi yang punya pekerjaan.” (informan 2, 19 Maret 2025)

Pelaksanaan program rehabilitasi di PPS Mardi Utomo juga mencakup berbagai kegiatan yang terstruktur dan menyeluruh, sebagaimana dijelaskan oleh Informan 4. PPS Mardi Utomo menjalankan pendekatan kuratif secara holistik dalam proses rehabilitasi penerima manfaat. Aspek kuratif terlihat dari berbagai bimbingan yang mendukung pemulihan fisik, mental, dan sosial secara terpadu. Bimbingan kebersihan dan senam menjadi bagian dari pemeliharaan kesehatan fisik, sementara kultum dan bimbingan agama seperti belajar sholat dan mengaji berfungsi sebagai pembinaan moral dan spiritual. Pelatihan disiplin seperti apel pagi dan kegiatan piket menyapu halaman membentuk sikap tanggung jawab dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengawasan menu makanan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan gizi sebagai bagian dari upaya kuratif yang bersifat preventif dan pemulihan. Penerima manfaat juga mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kemampuan individu, seperti tata boga, menjahit, pijat refleksi, dan berjualan—yang bahkan telah diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh beberapa penerima manfaat. Bimbingan sosial dalam bentuk diskusi kelompok melatih kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, yang penting dalam proses reintegrasi sosial. Bahkan, adanya sistem rujukan ke lembaga atau fasilitas lain sesuai kebutuhan penerima manfaat menunjukkan bahwa pendekatan kuratif di PPS Mardi Utomo tidak terbatas pada fasilitas internal, melainkan juga mengakomodasi intervensi lanjutan yang lebih spesifik. Hal ini memperkuat bahwa rehabilitasi yang dilakukan benar-benar memperhatikan keseluruhan

dimensi pemulihan. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 4 yaitu :

“rehabilitasi dilakukan melibatkan bimbingan kesehatan spt bimbingan kebersihan, senam dll, kultum sbg bimbingan mental dan moral, pelatihan kedisiplinan untuk apel pagi piket menyapu, bimbingan agama spt belajar sholat dan mengaji, pengawasan menu makanan untuk kesehatan, perujukan penerima manfaat ke lembaga dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan nya. Pelatihan ketrampilan sesuai dengan kemampuan PM tata boga, jait, pijat refleksi, berjualan, dll (pak joni berjualan degan, pak Muhammad semir Sepatu, dll). Bimbingan sosial : bimbingan berkelompok untuk melatih hidup bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik.” (informan 4, 20 Maret 2025)

Selanjutnya, rehabilitasi di PPS Mardi Utomo dilaksanakan dengan pendekatan kuratif yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi serta ketersediaan sumber daya yang ada. Meskipun informan berposisi sebagai staf tata usaha dan tidak secara langsung terlibat dalam perancangan program, ia menggambarkan bahwa rehabilitasi mencakup bimbingan dan konseling dengan metode pendekatan yang bervariasi, termasuk pelatihan keterampilan dan pembinaan. Kegiatan seperti menjahit, bertukang, memasak, hingga keterlibatan anak-anak dalam pendidikan dasar melalui sekolah terdekat menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan pemulihan menyeluruh—baik dari sisi kemampuan individu maupun keberlangsungan kehidupan sosialnya. Penjelasan mengenai target sasaran rehabilitasi, yakni pengangguran, gelandangan, dan orang dengan kondisi marginal lainnya (remaja, dewasa, lansia), mengindikasikan bahwa program dirancang untuk merespons kerentanan sosial yang beragam. Kendati pelatihan keterampilan tidak dilakukan secara rutin dan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pengajar, pendekatan kuratif tetap berjalan melalui penyediaan kegiatan bermakna yang bertujuan membentuk kembali kemandirian dan fungsi sosial penerima manfaat. Adanya integrasi dengan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya juga menunjukkan sensitivitas dalam menjangkau kebutuhan kuratif secara kontekstual. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 5 yaitu :

“Program rehabilitasi itu adalah salah bimbingan atau konseling yang diberikan oleh Penerima Manfaat dengan metode metode pendekatan yang berbeda beda, seperti melakukan keterampilan, pembinaan, serta pelatihan pelatihan kepada para Penerima Manfaat ini. Karena saya staff tata usaha jadi untuk detail program nya bisa ditanyakan ke pekerja sosialnya. Selebihnya yang jelas melibatkan Pendidikan Dasar, terutama bagi anak anak ya mas walaupun untuk targetnya sendiri dari Mardi Utomo itu salah mas karena untuk anak itu sudah ada Panti Anak. Target Mardi Utomo itu lebih ke orang pengangguran, gelandangan dan orang pengemis mas. Disitu kami juga memilihnya remaja, dewasa dan lansia mas. Cuman kadang beberapa keluarga itu tidak bisa dipisah dengan anaknya jadi makannya kita harus merehabilitasi anaknya juga salah satunya dengan memasukan ke Sekolah Dasar terdekat mas. Untuk bimbingan keterampilan itu se pengelihatan saya tidak pasti, karena seberjalannya saja mas kadang seminggu ini ada menjahit, nukang, memasak tapi nanti di minggu kedepannya berbeda lagi. lebih ke tergantung tenaga yang mengajarnya bisa datangnya kapan.” (informan 5, 20 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa PPS Mardi Utomo telah melaksanakan program rehabilitasi yang efektif dan memenuhi aspek kuratif secara menyeluruh. Program-program yang ditawarkan dirancang untuk mendukung pemulihan fisik, mental, dan sosial penerima manfaat. Kegiatan seperti bimbingan kesehatan yang meliputi pengelolaan makanan dan kebersihan, serta pelatihan fisik seperti senam dan olahraga, telah membantu penerima manfaat dalam memulihkan kondisi tubuh mereka. Selain itu, bimbingan mental dan spiritual yang mencakup aktivitas seperti sholat dan mengaji, serta pembinaan disiplin dan tanggung jawab, turut memperkuat aspek psikologis penerima manfaat, memberikan mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan positif setelah rehabilitasi.

Lebih jauh lagi, pelatihan keterampilan yang beragam, mulai dari tata boga, pertukangan, hingga menjahit dan berjualan, juga menjadi bagian penting dari program rehabilitasi kuratif yang dijalankan oleh PPS Mardi Utomo. Dengan adanya instruktur yang terlatih di setiap bidang keterampilan, penerima manfaat diberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan praktis yang mendukung mereka dalam memperoleh pekerjaan

atau membuka usaha setelah selesai dari rehabilitasi. Selain itu, penguatan karakter dan kepribadian juga dilakukan melalui bimbingan sosial dan mental, termasuk terapi untuk permasalahan psikososial dan trauma akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, PPS Mardi Utomo tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik dan mental, tetapi juga memastikan bahwa penerima manfaat siap menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri, sehingga aspek kuratif dalam rehabilitasi terlaksana dengan baik.

#### **3.2.1.2. Implementasi Rehabilitasi yang bersifat Promotif**

Selain rehabilitasi yang bersifat kuratif, para informan juga menggambarkan bahwa PPS Mardi Utomo telah mengintegrasikan pendekatan promotif secara kuat dalam proses rehabilitasi sosial. Program-program yang disediakan, mulai dari bimbingan spiritual, mental, kedisiplinan, hingga pelatihan keterampilan, tidak hanya berfungsi sebagai proses pemulihan internal, tetapi juga sebagai bentuk penguatan kapasitas diri penerima manfaat. Kegiatan tersebut secara langsung bertujuan untuk membekali penerima manfaat dengan keterampilan hidup yang diperlukan agar mereka dapat hidup mandiri pasca-rehabilitasi. Pelatihan seperti keterampilan menjahit, memasak, bertukang, hingga berjualan, menjadi sarana promosi nilai-nilai produktivitas, kemandirian, dan keberdayaan. Aspek promotif juga tampak dalam proses penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, serta pembinaan komunikasi interpersonal, yang semuanya merupakan modal sosial penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, bentuk dukungan pasca-rehabilitasi melalui penyediaan pinjaman usaha menunjukkan langkah konkret lembaga dalam memperpanjang efek dari pendekatan promotif yang telah dijalankan selama masa rehabilitasi. Program pinjaman ini tidak semata-merta diberikan, melainkan berdasarkan evaluasi terhadap sikap, keterampilan, dan kemampuan komunikasi penerima manfaat selama menjalani proses rehabilitasi. Artinya, PPS Mardi Utomo tidak hanya mendorong perubahan perilaku selama berada di dalam

lembaga, tetapi juga memberikan kepercayaan dan peluang nyata kepada penerima manfaat untuk mengembangkan hidup yang lebih mandiri setelah keluar. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran promotif yang berorientasi jangka panjang dan transformatif, yaitu menyiapkan individu untuk tidak hanya pulih dari kondisi ketergantungan atau keterlantaran, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang aktif dan produktif di tengah masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan bukan sekadar bersifat preventif atau edukatif, tetapi benar-benar memfasilitasi proses pemberdayaan secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 3 yaitu :

“program-program disini saya rasa sudah mencerminkan adanya pengelolaan PGOT dengan tujuan reintegrasi mereka ke masyarakat. Kami punya berbagai bimbingan dan pelatihan, mulai dari bimbingan spiritual, mental, kedisiplinan, ketrampilan, dan sebagainya. Didalam pelatihan ketrampilan itu ada macam2 ketrampilan, hal ini dimaksud supaya Ketika mereka keluar dari rehabilitasi mereka bisa membuka usaha atau bekerja, bahkan kami juga menyediakan pinjaman untuk yang sudah selesai rehab mau membuka usaha, nanti persetujuan nya melihat dari sikap sehari2 penerima manfaat ini, apakah ketrampilannya dan kemampuan komunikasinya memadai untuk kita pinjami modal begitu” (informan 3, 20 Maret 2025)

PPS Mardi Utomo juga menunjukkan aspek promotif, yang berfokus pada pemberdayaan penerima manfaat agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari rehabilitasi. Salah satu wujud nyata dari pendekatan promotif adalah adanya pengajaran disiplin, yang sangat penting dalam membangun kembali tanggung jawab pribadi dan sosial para penerima manfaat. Dengan menjalankan program secara teratur dan menyeluruh, lembaga ini berupaya mengedukasi penerima manfaat tentang pentingnya pola hidup yang sehat, mandiri, dan produktif. Lebih lanjut, keterlibatan penerima manfaat dalam pelatihan keterampilan bukan hanya untuk memberikan bekal profesi, tetapi juga untuk menguatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Semua ini diharapkan akan mendorong penerima manfaat untuk memulai usaha atau kembali bekerja setelah mereka

selesai dari rehabilitasi, dengan tujuan utama untuk reintegrasi sosial yang sukses. Melalui pendekatan promotif ini, PPS Mardi Utomo tidak hanya membantu mereka pulih dari ketergantungan, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan stabil. Hal ini sesuai dengan keterangan informan 1 yaitu :

“kami ini kan unit pelaksana teknis, semua yang kami laksanakan itu sudah diatur programnya apa saja, anggaran nya berapa, dan sebagainya. Kami melaksanakan dengan sebaik-baiknya program-program tersebut. Program semua sudah lengkap, Kesehatan mulai dari makanan dan kebersihan kami bantu, mental dan spiritual kami bantu, bimbingan sosial juga kami berikan, pelatihan ketrampilan juga ada berbagai macam dengan instrukturnya masing-masing di setiap keahlian, kemudian kami juga mengajarkan disiplin. Semua untuk mencapai tujuan reintegrasi” (informan 1, 19 Maret 2025)

PPS Mardi Utomo juga telah melaksanakan pendekatan yang sangat kuat dalam aspek promotif melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat agar dapat hidup mandiri dan produktif setelah proses rehabilitasi. Berdasarkan wawancara, pelatihan keterampilan yang diberikan—seperti tata boga, menjahit, dan pertukangan—berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan keterampilan praktis yang dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membuka usaha atau memperoleh pekerjaan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong penerima manfaat untuk memulihkan diri dari ketergantungan, tetapi juga memperkenalkan mereka pada peluang hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih produktif. Selain itu, pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, kedisiplinan, dan pengajaran mental serta spiritual, bertujuan untuk membangun sikap positif dan memperkuat kesiapan mereka untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, aspek promotif juga terlihat dalam penyediaan pinjaman modal usaha bagi penerima manfaat yang telah menyelesaikan rehabilitasi, dengan penilaian berdasarkan sikap, keterampilan, dan kemampuan komunikasi yang dimiliki penerima manfaat dalam

berjualan nantinya. Hal ini mencerminkan upaya PPS Mardi Utomo dalam mendukung penerima manfaat untuk memulai usaha mereka sendiri dan memberikan peluang nyata untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Melalui dukungan ini, penerima manfaat tidak hanya diberikan bekal keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan mandiri. Dengan demikian, program-program di PPS Mardi Utomo tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga sangat promotif dalam mendorong penerima manfaat untuk mengembangkan potensi mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai reintegrasi sosial yang sukses.

#### **3.2.1.3. Keberlanjutan program Rehabilitasi**

Informan 1 menyampaikan bahwa tujuan utama dari program rehabilitasi yang dijalankan di PPS Mardi Utomo adalah untuk mendukung proses reintegrasi para PM ke dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua PM mampu beradaptasi dengan kehidupan di luar setelah meninggalkan lembaga. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mempertahankan kemandirian dan akhirnya kembali lagi ke PPS Mardi Utomo. Pihak lembaga sendiri tetap membuka pintu dengan tangan terbuka bagi para PM yang kembali, namun situasi ini menimbulkan kesan bahwa tidak ada keberlanjutan dari hasil rehabilitasi yang telah dilakukan. Padahal, menurut informan, proses rehabilitasi telah dijalankan dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan keberhasilan reintegrasi secara berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada upaya dari pihak lembaga, tetapi juga pada kesiapan individu dan dukungan lingkungan setelah mereka kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 1 yaitu :

“tentu kami selalu menginginkan para PGOT ini untuk bisa reintegrasi, namun adakalanya setelah Kembali kemasyarakat ternyata mereka nggak mampu menjalani kehidupan diluar hingga akhirnya harus Kembali lagi ke PPS Mardi Utomo, tentunya kami selalu membuka pintu bagi para PGOT, namun jadinya seolah tidak ada keberlanjutan dari

rehabilitasi yang dilakukan, padahal kami sudah melakukan dengan sebaik-baiknya dan Ikhlas.” (informan 1, 19 Maret 2025)

Informan 2 menjelaskan bahwa keberlanjutan program rehabilitasi sebenarnya telah diupayakan, salah satunya melalui penyesuaian durasi tinggal PM di PPS Mardi Utomo berdasarkan kesiapan individu untuk kembali ke masyarakat. Banyak PM yang menjalani masa rehabilitasi lebih dari satu tahun karena dinilai belum siap secara mental, sosial, maupun keterampilan untuk hidup mandiri di luar lembaga. Namun, di sisi lain, informan juga mengungkapkan adanya kecenderungan dari sebagian PM yang merasa terlalu nyaman berada di dalam panti, sehingga daya juang dan motivasi untuk kembali ke masyarakat menjadi lemah. Akibatnya, ada PM yang kembali lagi setelah keluar, atau bahkan bertahan terlalu lama di lembaga. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi, karena keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh lamanya proses pembinaan, tetapi juga oleh kemauan dan kesiapan dari masing-masing individu untuk berubah dan mandiri. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 2 :

“dilihat dari banyaknya PGOT yang direhabilitasi lebih dari 1 tahun, keberlanjutan itu sudah dilakukan ketika kita menganggap PGOT ini belum siap dilepas ke masyarakat. Namun seringkali PGOT ini merasa nyaman dan kurang daya juang, sehingga akhirnya setelah keluar dari panti malah mereka kembali atau di PPS Mardi Utomo ini terlalu lama.” (informan 2, 19 Maret 2025)

Informan 3 menegaskan bahwa seluruh program rehabilitasi yang dijalankan di PPS Mardi Utomo diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu membantu PM agar dapat kembali dan beradaptasi di masyarakat secara mandiri. Setelah proses rehabilitasi selesai dan PM kembali ke lingkungan sosialnya, pihak lembaga tidak langsung melepas tanggung jawab, melainkan tetap melakukan pemantauan, terutama terhadap usaha kecil atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh PM. Dalam praktiknya, ada yang berhasil menjalankan usahanya, namun tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Informan menjelaskan

bahwa kegagalan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk ketidakberlanjutan program, karena banyak faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan PM setelah keluar dari panti. Meskipun demikian, pihak lembaga tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama proses rehabilitasi berlangsung dan mendukung PM dalam menjalani proses reintegrasi secara maksimal. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 3 yaitu :

“kita sebisa mungkin mencapai tujuan supaya mereka kembali kemasyarakat dengan baik, program-program yang ada disini semua berusaha untuk mencapai tujuan itu. Setelah mereka kembali ke masyarakat, kami juga kadang mengontrol bagaimana bisnis kecil mereka berjalan, beberapa berhasil dan beberapa juga gagal, yang gagal ini bukan berarti program kami tidak berkelanjutan, karena banyak faktor-faktor lain diluar sana yang membuat orang ini belum bisa bertahan. Tapi yg jelas kami selalu berusaha melakukan yang terbaik.” (informan 3, 20 Maret 2025)

Informan 4 menjelaskan bahwa mengukur keberlanjutan program rehabilitasi merupakan hal yang kompleks dan tidak semata-mata dapat dilihat dari kelangsungan pelaksanaannya saja. Menurutnya, program memang terus berjalan secara berkesinambungan, namun keberlanjutan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan semangat, motivasi, dan keinginan dari PM untuk berkembang dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Keberhasilan program, menurut informan, tidak hanya diukur dari aspek fisik atau keterampilan, tetapi juga dari perubahan sikap dan karakter individu. Indikator keberhasilan meliputi ketaatan beragama, kedisiplinan, kepribadian yang baik, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, keberlanjutan yang dimaksud bukan hanya bersifat administratif atau programatik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan perubahan dalam diri PM itu sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 4 yaitu :

“mengukur keberlanjutan ini kan cukup kompleks, dilakukannya memang selalu berlanjut, namun terkadang keberlanjutan ini tidak ada artinya kalo dari pihak PM nya ini tidak ada semangat dan tidak ada

motivasi, dan tidak ada keinginan untuk berkembang dan berreintegrasi. Indikator berhasil : bertakwa pada Tuhan dan disiplin, memiliki kepribadian yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik dan menghidupi diri sendiri.” (informan 4, 20 Maret 2025)

PPS Mardi Utomo telah berupaya sebaik mungkin untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi yang diberikan kepada penerima manfaat. Melalui pelatihan keterampilan, bimbingan mental, spiritual, serta pembinaan kedisiplinan, lembaga ini berkomitmen untuk mempersiapkan penerima manfaat agar dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat. Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan dengan baik, terdapat banyak faktor eksternal di luar kendali lembaga yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial. Kondisi kurangnya motivasi dan kemalasan para penerima manfaat seringkali menjadi hambatan besar yang membuat penerima manfaat kesulitan untuk mempertahankan perubahan yang telah dicapai. Akibatnya, meskipun telah melalui proses rehabilitasi yang intensif, beberapa penerima manfaat terpaksa kembali mengikuti rehabilitasi lagi, karena faktor-faktor eksternal tersebut yang mendorong mereka kembali ke pola hidup lama.

Meskipun demikian, PPS Mardi Utomo terus berupaya untuk mengoptimalkan keberlanjutan program rehabilitasi dengan memberikan dukungan pasca-rehabilitasi seperti pinjaman modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diharapkan kedepannya PPS Mardi Utomo dapat semakin mengurangi angka kekambuhan, sehingga penerima manfaat bisa benar-benar menjalani hidup baru yang lebih baik dan mandiri.

#### **3.2.1.4. Upaya yang dilakukan guna mempercepat Rehabilitasi**

Informan 1 menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi, PPS Mardi Utomo aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan pesantren, di mana para pengabdian dari pesantren datang secara sukarela untuk memberikan pengajaran agama kepada para PM. Kegiatan ini dilakukan tanpa imbalan, murni sebagai bentuk pengabdian. Para pengajar dari pesantren tersebut dinilai memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang keagamaan, sehingga materi yang disampaikan pun lebih terarah dan berbobot. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat aspek spiritual dari program rehabilitasi, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan dan pembinaan para PM. Kolaborasi semacam ini menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan internal, sekaligus memperkaya kualitas pembinaan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 1 :

“kita sering mengajak bekerjasama beberapa instansi lain yang bersedia membantu, seperti contohnya kita ada Kerjasama dengan pesantren. Dimana para pengabdian di pesantren datang kesini dan mengajari para PGOT mengaji, itu semua dilakukan tanpa imbalan, mereka benar mengabdikan. Selain itu mereka punya ilmu terkhusus agama sehingga punya materi lebih ttg agama untuk diajarkan kepada para PGOT.” (informan 1, 19 Maret 2025)

Informan 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di PPS Mardi Utomo tidak hanya mengikuti standar operasional prosedur dan perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi juga berjalan secara dinamis sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu contoh penyesuaian yang dilakukan adalah ketika terdapat anak-anak yang turut tinggal bersama orang tuanya di dalam lembaga, meskipun secara ideal layanan ini diperuntukkan bagi PM dewasa. Dalam situasi tersebut, pihak lembaga berusaha menyesuaikan pelayanan dengan menyediakan kegiatan alternatif bagi anak-anak, agar mereka tetap memiliki aktivitas yang bermanfaat selama di dalam panti. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung fokus orang tua dalam mengikuti pelatihan keterampilan tanpa terganggu oleh kewajiban mengasuh anak

selama kegiatan berlangsung. Pendekatan yang adaptif ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga keberlanjutan program, meskipun menghadapi situasi yang tidak selalu ideal di lapangan. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 2 :

“selain sesuai dengan SOP dan perencanaan, kita memang selalu dinamis dalam melaksanakan program ya, yang seharusnya tidak ada anak-anak jadi ada anak-anak tentu kita juga harus menyesuaikan pelayanan kita dengan adanya anak-anak ini. Ketika orang tuanya sedang pelatihan ketrampilan, anak-anak ini harus diberikan aktifitas lain supaya keduanya punya kegiatan dan orang tuanya bisa focus mengikuti pelatihan.” (informan 2, 19 Maret 2025)

Informan 3 mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lambatnya proses rehabilitasi bukan terletak pada kelemahan program, melainkan pada kurangnya kerja sama dan kedisiplinan dari sebagian PM. Beberapa PM menunjukkan perilaku yang tidak mendukung proses pemulihan, seperti mabuk-mabukan di malam hari, melanggar aturan, atau bahkan mencoba kabur dari panti. Kondisi ini menghambat jalannya kegiatan pelatihan dan pembinaan yang telah dirancang untuk membantu mereka kembali mandiri di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak lembaga kadang harus melibatkan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam melakukan pengawasan, terutama di malam hari, guna menertibkan PM yang tidak kooperatif. Inovasi dan tindakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan partisipasi PM dalam program pelatihan keterampilan yang disediakan. Dengan demikian, proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan tujuan reintegrasi sosial dapat lebih mudah tercapai. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 3 yaitu :

“sebenarnya menurut saya rehab yang berjalan lambat itu karena kurang Kerjasama dan sikap dari PGOT itu sendiri. Beberapa dari mereka tidak tertib, mabuk2an di malam hari dan sebagainya, kabur dan sebagainya, sehingga akhirnya harusnya melibatkan babinkamtib untuk mengecek malam hari supaya yang tidak tertib ini bisa ditertibkan, dan supaya mereka lebih rajin ikut pelatihan ketrampilan.” (informan 3, 20 Maret 2025)

Informan 4 menjelaskan bahwa dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada PM, pihak lembaga berupaya menyesuaikan jenis pelatihan dengan minat dan kemampuan masing-masing individu. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena PM cenderung lebih antusias dan terlibat aktif ketika mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kesukaan mereka. Sebagai contoh, ibu-ibu yang tidak tertarik pada bidang tata boga tetapi memiliki minat pada keterampilan menjahit akan difokuskan untuk mengikuti pelatihan menjahit, bukan pelatihan memasak. Demikian pula, PM laki-laki yang lebih berminat pada pertukangan akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan pertukangan, bukan pelatihan pijat refleksi. Penyesuaian ini dilakukan agar proses pembelajaran berjalan lebih efisien dan hasil yang dicapai lebih maksimal. Dengan memperhatikan preferensi individu, lembaga berharap proses rehabilitasi tidak hanya berjalan secara 15 akita15rative, tetapi juga mampu membangun motivasi dan kemandirian yang nyata dari dalam diri PM. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 4 yaitu :

“kita memberikan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kesukaan dan kebiasaan dari PM, karena akan jauh lebih efektif kalo PM nya suka dan menikmati ketrampilan tersebut daripada 15 aki PM nya tidak suka. Contohnya ibu-ibu yang tidak suka masak tp suka menjahit ya tidak kita ajarin masak, kita focus ajarin menjahit. Atau bapak-bapak yang suka pertukangan 15 akita focus ngajarin pertukangan, bukan kita ajarin pijat refleksi. Harapannya supaya lebih efisien.” (Informan 4, 20 Maret 2025)

Informan 5 menekankan pentingnya pemantauan yang konsisten terhadap PM agar mereka mengikuti seluruh rangkaian program rehabilitasi dengan disiplin. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan keberlanjutan partisipasi dari PM dalam setiap kegiatan yang disediakan. Meskipun fasilitas yang dimiliki lembaga tergolong terbatas, seluruh sarana yang ada telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Informan juga memandang bahwa adanya berbagai bentuk bimbingan—baik keterampilan, mental, maupun fisik—merupakan bentuk inovasi

dalam mendekatkan program dengan kebutuhan PM. Namun, agar program ini benar-benar efektif, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan strategis dari petugas, khususnya dalam membangun hubungan yang mendorong motivasi dan kedisiplinan dari PM. Pendekatan yang tepat akan membantu menciptakan konsistensi dalam partisipasi PM, yang menjadi kunci utama dalam mempercepat dan mengefektifkan proses rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 5 yaitu :

“Untuk mempercepat program rehabilitasinya itu kita harus pantau mereka para Penerima Manfaat agar mengikuti rehabilitasi dengan sesuai dan konsisten, kita juga benar benar memanfaatkan fasilitas yang ada walaupun terbatas juga. Menurut saya dengan adanya bimbingan keterampilan, bimbingan mental, bimbingan fisik dan sebagainya itu sudah termasuk ke inovasi. Mungkin agar kita untuk melakukan pendekatan itu harus lebih agar mereka para Penerima Manfaat ini bisa konsisten mengikuti bimbingan bimbingan dan disiplin” (informan 5, 20 Maret 2025)

### **3.2.2. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan peran sebagai Implementor**

Informan 1 mengungkapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kompleksitas latar belakang keluarga para PM. Dalam beberapa kasus, hampir seluruh anggota keluarga termasuk dalam kategori PGOT, sehingga upaya untuk mengembalikan PM ke lingkungan keluarganya setelah masa rehabilitasi menjadi tidak memungkinkan. Padahal secara ideal, setelah menjalani program selama satu tahun, PM seharusnya dapat kembali ke keluarganya sebagai bagian dari proses reintegrasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga, terutama ketika dukungan dari lingkungan terdekat tidak tersedia. Selain itu, informan juga menyoroti persoalan internal seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah PM yang harus ditangani, keterbatasan sarana dan prasarana, serta metode pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Efisiensi anggaran juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap kelancaran program. Semua faktor ini saling berkaitan dan turut memengaruhi kualitas serta

keberlanjutan program rehabilitasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan keterangan

Informan 1 yaitu :

“kadang ada kendala kompleksitas permasalahan di keluarga PM, terkadang dari 5 anggota keluarga 4 diantaranya termasuk golongan PGOT sehingga sulit dikembalikan dari rehab, karena pada umumnya 1 tahun setelah selesai rehab seharusnya di kembalikan ke keluarga, tapi kalo keluarganya PGOT semua lalu mau dikembalikan kemana. SDM kurang banyak dibandingkan dengan jumlah PGOT. Sarpras yang tidak tercukupi, metode belajar yang belum efektif, efisiensi anggaran.” (informan 1, 19 Maret 2025)

Informan 2 mengungkapkan bahwa salah satu kendala besar dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada PM adalah ketidakjelasan identitas sebagian besar dari mereka. Banyak PM yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau akta kelahiran, sehingga mempersulit akses mereka terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dari PM yang tidak memiliki akta kelahiran, misalnya, menghadapi kesulitan untuk mendaftar ke sekolah atau melakukan perpindahan sekolah, karena tidak adanya dokumen yang sah. Selain itu, ketidakhadiran identitas yang jelas juga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kesehatan, karena pihak rumah sakit atau lembaga kesehatan memerlukan data yang valid untuk dapat memberikan perawatan. Ketidakjelasan identitas ini menjadi salah satu hambatan serius dalam proses reintegrasi PM ke masyarakat, karena tanpa identitas yang sah, mereka akan kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 2 :

“identitas PM yang tidak jelas, tidak punya NIK, anak-anak sulit sekolah karena tidak ada akta kelahiran. Sulit mengurus perpindahan sekolah dan sebagainya, sulit utk memberikan pelayanan Kesehatan krn tidak adanya identitas.” (informan 2, 19 Maret 2025)

Informan 3 menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi adalah rendahnya partisipasi aktif dari sebagian PM. Meskipun seluruh

fasilitas, pelatihan, dan bimbingan telah disiapkan secara lengkap oleh lembaga, dalam praktiknya tidak semua PM menunjukkan kemauan untuk mengikuti program dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan harus terus-menerus diingatkan dan diajak agar bersedia mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan. Informan menekankan bahwa tujuan utama lembaga adalah membantu PM agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan kedisiplinan, namun hal ini sulit tercapai apabila dari diri PM sendiri tidak ada semangat, daya juang, atau kemampuan untuk bekerja sama. Kurangnya motivasi dan kedisiplinan dari PM menjadi hambatan serius dalam proses rehabilitasi, sehingga meskipun pihak lembaga telah bekerja keras menyediakan seluruh kebutuhan, hasil yang diharapkan tetap sulit untuk dicapai. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 5 yaitu :

“beberapa penerima manfaat ini sangat sulit dikoordinasi, kadang untuk mengikuti program pelatihan dan bimbingan itu perlu dikejar-kejar. Kami sudah menyediakan semuanya disini dan kami ingin mereka mau mengikuti program supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik, tapi dari diri mereka sendiri itu tidak ada daya juang nya, tidak disiplin, tidak bisa bekerjasama, sehingga sulit tercapai tujuan itu, meskipun kami bekerja keras menyediakan semua kebutuhan mereka.” (informan 3, 20 Maret 2025)

Informan 4 juga menyoroti beberapa kendala utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi di PPS Mardi Utomo. Salah satu persoalan mendasar adalah ketidaklengkapan identitas PM, di mana sebagian dari mereka tidak memiliki KTP atau bahkan tidak terdaftar secara administrasi kependudukan. Kondisi ini menyulitkan akses terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, serta menjadi hambatan dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Selain itu, informan juga mencatat bahwa tidak semua PM memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti program rehabilitasi dengan baik. Kurangnya kemauan untuk berubah dari dalam diri PM menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan juga terbentur oleh keterbatasan fasilitas pelatihan yang belum sepenuhnya memadai serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas,

yakni hanya 24 orang. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program dan pendampingan terhadap PM secara individual maupun kelompok. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 4 :

“identitas PM yang terkadang tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP, kurang nya motivasi dari diri PM untuk reintegrasi dan mengikuti program rehabilitasi dgn baik. Fasilitas pelatihan yang kurang memadai. Kurang SDM, hanya 24 orang” (informan 4, 20 Maret 2025)

Informan 5 menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan program rehabilitasi di PPS Mardi Utomo adalah kesulitan dalam mengarahkan dan membujuk PM agar mau mengikuti kelas-kelas bimbingan keterampilan. Banyak dari mereka yang justru lebih memilih untuk beristirahat atau bersantai dibanding mengikuti kegiatan yang telah disiapkan. Menurut informan, sebagian PM bahkan tampak menganggap PPS Mardi Utomo sebagai tempat tinggal permanen, padahal lembaga telah menetapkan masa rehabilitasi selama satu tahun sebagai batas waktu ideal. Di sisi lain, keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan. Jumlah petugas yang terbatas membuat pendampingan terhadap PM menjadi kurang optimal, terutama dalam hal membangun kedisiplinan dan mendorong partisipasi aktif dalam program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari PM, serta dukungan sumber daya yang memadai dari pihak penyelenggara hal ini sesuai dengan keterangan Informan 5 :

“Balik lagi mas para Penerima Manfaatnya ini yang susah dikendalikan mas dan susah untuk membujuk beliau ikut pada kelas bimbingan keterampilan. Mereka lebih memilih tidur tiduran gitu mas. Pertama itu dari Penerima Manfaat, beberapa kali mereka ini sudah menjadikan Mardi Utomo itu sebagai tempat tinggal mereka selamanya padahal dari kita sudah memberi waktu 1 tahun untuk mereka. Kedua itu Sumber Daya Manusia disini itu sangat terbatas mas untuk menangani banyaknya Penerima Manfaat disini.” (informan 5, 20 Maret 2025)

Informan 1 menambahkan bahwa meskipun kerja sama dengan pihak luar seperti

pesantren sangat membantu dalam memberikan pengajaran agama kepada PM, keberlangsungan kegiatan tersebut tidak selalu konsisten. Hal ini disebabkan karena para pengabdian datang secara sukarela dan tanpa ikatan formal, sehingga kehadiran mereka sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan inisiatif pribadi. Lembaga tidak memiliki kewenangan penuh untuk meminta mereka hadir secara rutin. Akibatnya, meskipun niat dan kontribusi mereka sangat berarti, proses pengajaran agama tidak selalu berjalan secara terjadwal dan berkelanjutan. Ketidakkonsistenan ini menjadi salah satu kendala dalam menjaga kesinambungan pembinaan spiritual yang merupakan bagian penting dari program rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 1 :

“mendatangkan pengabdian yang memberikan pengajaran secara cuma-cuma inikan tidak bisa dilakukan setiap saat, karena bukan kewenangan kami untuk meminta mereka datang, tapi itu dengan keinginan mereka sendiri. Sehingga akibatnya terkadang pengajaran yang dilakukan tidak konsisten.” (informan 1, 19 Maret 2025)

Informan 2 mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi, terutama 20ombag harus menangani jumlah PM yang cukup banyak. Kondisi ini semakin menantang 20ombag di dalam 20ombaga juga terdapat anak-anak dari para PM, yang membutuhkan perhatian dan penanganan tersendiri. Dengan jumlah petugas yang terbatas, upaya untuk menjalankan berbagai kegiatan secara bersamaan menjadi sulit, baik dalam hal pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, maupun pengawasan harian. Keterbatasan ini berpengaruh pada efektivitas pelayanan yang diberikan dan menjadi hambatan dalam menjaga kualitas serta mengakselerasi program rehabilitasi yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 2 :

“karena jumlah SDM nya kurang, sehingga upaya untuk melakukan banyak hal secara bersamaan dengan jumlah PGOT yang banyak ini susah ya. Belum lagi ada anak-anak dari para PGOT ini.”  
(informan 2, 19 Maret 2025)

Informan 3 mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi adalah problematika dari para PM itu sendiri, khususnya terkait dengan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah masa rehabilitasi. Sering kali, PM tidak diterima oleh keluarga atau komunitas mereka, yang mengakibatkan mereka ke PPS Mardi Utomo. Proses mempercepat rehabilitasi menjadi semakin sulit karena minimnya kesadaran dari pihak PM itu sendiri. Meskipun demikian, pihak PM terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengajaran, bimbingan, pelatihan keterampilan, dan penertiban yang diperlukan untuk membantu mereka ke masyarakat dengan lebih siap. Namun, keterbatasan yang ada pada sikap dan motivasi PM tetap menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan akhir program rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 3 :

“lagi-lagi kendalanya adalah problematika PGOT ini sendiri, kadang mereka untuk dikembalikan itu tidak ada yang menerima, sehingga akhirnya Kembali. Mempercepat proses rehab itu hal yang sulit dilihat dari Kerjasama PGOT itu sendiri yang sulit. Yg jelas kami selalu mencoba melakukan pengajaran, bimbingan, pelatihan, dan penertiban sebaik mungkin.” (informan 3, 20 Maret 2025)

Informan 4 menekankan bahwa meskipun rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada PM sudah disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka, serta bahkan disediakan modal untuk memulai usaha, faktor motivasi pribadi dari PM tetap menjadi kendala utama. Tanpa adanya motivasi dan daya juang yang kuat dari dalam diri mereka, upaya rehabilitasi yang dilakukan, sebaik apapun, akan sulit membuahkan hasil yang optimal. Menurutnya, keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada kemauan PM untuk mandiri dan berusaha, serta mentalitas yang siap untuk menghadapi tantangan di luar panti. Jika mentalitas ini belum terbentuk, meskipun program rehabilitasi sudah lengkap, PM tetap akan kesulitan untuk diterima kembali oleh masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan keterangan informan 4 yaitu :

“Kembali lagi ke motivasi PM ini, mereka seringkali tidak ada motivasi dan tidak ada daya juang untuk reintegrasi. Sehingga sebaik apapun rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan yang dilakukan, akan tetap gagal kalau mereka tidak mau berdiri sendiri. Meskipun sudah diajari sesuai kesukaan, sesuai kemampuan, bahkan dipinjami modal untuk usaha, tetapi kalau mentalitasnya kurang, mereka tetap sulit reintegrasi ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat.” (informan 4, 20 Maret 2025)

Informan 5 menjelaskan bahwa meskipun pihak lembaga sudah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan rehabilitasi, beberapa PM sudah merasa nyaman dan bahkan menjadikan PPS Mardi Utomo sebagai tempat tinggal tetap. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit untuk dibina lebih lanjut dan tidak memiliki motivasi untuk keluar dan kembali ke masyarakat. Informan juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi, antara lain terbatasnya anggaran yang menghambat pelaksanaan bimbingan, kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan pendekatan lebih intensif kepada PM, serta keterbatasan fasilitas yang tersedia. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi para PM ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan 5 yaitu :

“Dari kami sudah melakukan yang terbaik dan sebisa mungkin, tetapi balik lagi dengan para Penerima Manfaat ini mereka sudah menjadikan ini sebagai tempat tinggal dan sudah susah untuk dibina bahkan mereka para Penerima Manfaat sudah nyaman dan bisa dibilang mereka betah di Panti Mardi Utomo. Banyak kendala kendalanya juga seperti Anggaran untuk melakukan bimbingan tidak ada, jadi dari kita tidak bisa melaksanakan bimbingan, Sumber Daya Manusia sangat sangat terbatas sekali untuk bisa melakukan pendekatan pendekatan dengan Para Penerima Manfaat, dan terakhir lebih ke Fasilitas yang terbatas juga mas” (informan 5, 20 Maret 2025)

### **3.3. Pembahasan**

#### **3.3.1. Peran PPS Mardi Utomo Sebagai Implementor**

Sebagai unit pelaksana teknis yang dibawahhi oleh Dinas Sosial, PPS Mardi Utomo

memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan regulasi terkait pengelolaan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi sosial, PPS Mardi Utomo seharusnya berfokus pada dua hal utama: pertama, memberikan rehabilitasi yang komprehensif bagi para PGOT, dengan tujuan utama reintegrasi mereka ke masyarakat, dan kedua, memastikan keberlanjutan serta keberhasilan rehabilitasi melalui dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak.

Sebagai implementor, PPS Mardi Utomo perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan program-program rehabilitasi dengan sebaik-baiknya, yang meliputi pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, serta pendampingan sosial dan fisik. Arahan ini tertera pada PERMENSOS Nomor 106/HUK/2009 pasal 21 yang berbunyi :

“Panti Sosial Bina Karya mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. “

Hal ini didukung dengan aspek-aspek rehabilitasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PERMENSOS Nomor 16 tahun 2020 pasal 10 yang berbunyi :

Rehabilitasi yang dilakukan adalah termasuk :

- a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
- b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
- c. dukungan keluarga;
- d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
- e. pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan;

- f. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
- g. dukungan aksesibilitas.

PPS Mardi Utomo juga telah mengintegrasikan aspek kesehatan dalam proses rehabilitasi, yang merupakan bagian penting dari Permensos No. 16 Tahun 2020. Berdasarkan penuturan Informan 1, pihak PPS Mardi Utomo selalu berusaha memastikan bahwa setiap PM mendapatkan perhatian yang baik dalam hal kesehatan, mulai dari penyediaan makanan yang sehat hingga bimbingan kebersihan dan pengawasan kesehatan. Hal ini bertujuan agar PM tidak hanya mengembangkan keterampilan dan kepribadian yang baik, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Selain itu, bimbingan mental dan spiritual juga diberikan untuk membantu mereka dalam membangun kepribadian yang lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Informan 2, yang menekankan bahwa PPS Mardi Utomo selalu berusaha memberikan bimbingan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan PM, baik melalui pengajaran agama maupun pelatihan fisik dan psikologis.

Bukan hanya itu, PPS Mardi Utomo juga memastikan agar program-program rehabilitasi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan standar yang ada, sesuai dengan amanat regulasi yang telah ditetapkan. Informan 4 menambahkan bahwa setiap pelatihan keterampilan diberikan sesuai dengan minat dan kemampuan PM, agar mereka dapat mengembangkan keahlian yang sesuai dengan kecenderungan mereka, seperti pelatihan menjahit, tata boga, atau pertukangan. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Mardi Utomo berusaha untuk memberikan pendekatan yang lebih personal dan relevan bagi setiap PM, agar mereka merasa lebih termotivasi dan dapat memperoleh hasil yang maksimal dari pelatihan yang diberikan. Dalam hal ini, PPS Mardi Utomo telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan PM yang mandiri, sehat, dan siap untuk kembali berkontribusi pada masyarakat setelah proses rehabilitasi selesai. Berikut gambarkan peran PPS Mardi Utomo sebagai implementor :

**Tabel 3.2 Peran PPS Mardi Utomo sebagai Implementor**

| Sub-gejala                                | Realitas Pelaksanaan |      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Cukup                | Baik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kuratif                                   |                      | ✓    | Penyembuhan dlm rehabilitasi dilakukan dgn baik dan melibatkan berbagai bimbingan baik mental, sosial, spiritual dan kedisiplinan.                                                                                                                                                                                                      |
| Promotif                                  |                      | ✓    | Upaya promotif dilakukan dgn baik dan melibatkan pelatihan berbagai macam keterampilan dengan instruktur yang ahli dalam bidangnya masing-masing, bahkan dukungan pinjaman modal bagi penerima manfaat yang potensial.                                                                                                                  |
| Keberlanjutan                             | ✓                    |      | Keberlanjutan dalam rehabilitasi terkendala kurangnya jumlah SDM sehingga pengawasan pasca-rehab sulit dilakukan karena SDM focus pada rehabilitasi yang sedang berlangsung, selain itu terdapat faktor kurangnya motivasi dan sikap baik dari penerima manfaat shg mengakibatkan kurang baiknya kondisi peneriman manfaat pasca-rehab. |
| Dukungan pemenuhan hidup layak            |                      | ✓    | Kesediaan tempat tinggal yang layak, MCK, makanan bergizi, dan tempat ibadah yang layak.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perawatan Sosial dan/atau Pengasuhan Anak | ✓                    |      | Meskipun peruntukan PPS Mardi Utomo adalah untuk PGOT usia produktif, namun beberapa penerima manfaat turut membawa anak yang masih balita dan menolak memberikan anaknya ke PPS yang sesuai peruntukannya, shg terjadi overcapacity yang menghambat perawatan sosial yang dilakukan.                                                   |
| Dukungan Keluarga                         |                      | ✓    | Terdapat program kunjungan rumah keluarga atau home visit bagi PGOT, PPS Mardi Utomo juga seringkali menjembatani konflik antara penerima manfaat dan keluarga meskipun tidak selalu berhasil.                                                                                                                                          |
| Terapi fisik, terapi                      |                      | ✓    | Kegiatan sehari-hari melibatkan aktifitas fisik, olahraga, dan juga melibatkan                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                             |  |   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psikososial, dan terapi mental spiritual    |  |   | bimbingan psikososial, bimbingan mental yang bekerja sama dengan fakultas psikologi UNDIP, dan juga bimbingan spiritual.                                                              |
| Pelatihan vokasional dan/atau kewirausahaan |  | ✓ | Telah dilakukan berbagai macam pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas diri penerima manfaat.                                                                              |
| Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial         |  | ✓ | Kesediaan fasilitas tempat tinggal dan lain-lain cukup membantu, termasuk dengan konsumsi sehari-hari. Asistensi sosial dilakukan dengan bimbingan individu maupun bimbingan klasikal |
| Dukungan Aksesibilitas                      |  | ✓ | PPS Mardi Utomo memberikan akses kepada anak-anak untuk dirujuk ke sekolah-sekolah terdekat, juga tersedia pinjaman modal bagi penerima manfaat yang potensial melakukan usaha.       |

PPS Mardi Utomo memiliki peran penting sebagai implementor dalam pengelolaan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) yang berada dalam kewenangan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Sebagai implementor, PPS Mardi Utomo bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program rehabilitasi yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama yaitu reintegrasi sosial dan pemberdayaan para penerima manfaat. Dalam kerangka ini, PPS Mardi Utomo tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan rehabilitasi, tetapi juga sebagai pihak yang menjembatani pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (Kementerian Sosial) dan pengkoordinasi program (Dinas Sosial) ke dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Mardi Utomo menjalankan peran sebagai implementor dengan menterjemahkan kebijakan ke dalam praktek lapangan yang lebih kompleks guna mencapai kepentingan seluruh stakeholder yaitu terkelolanya para PGOT.

Menurut teori Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi yang efektif bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kejelasan kebijakan, sumber daya yang memadai, dan kemampuan organisasi untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Dalam konteks ini, PPS Mardi Utomo berhasil mengelola program rehabilitasi PGOT dengan baik melalui pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, serta pembinaan kedisiplinan yang sangat penting untuk pemulihan penerima manfaat. Program-program tersebut sudah diatur dengan jelas oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, yang memastikan bahwa PPS Mardi Utomo memiliki pedoman dan anggaran yang jelas untuk menjalankan programnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa PPS Mardi Utomo mampu melaksanakan tugas implementasi dengan baik.

Sebagai upaya lebih untuk mencapai tujuan, PPS Mardi Utomo juga telah melakukan berbagai upaya akselerasi dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi para penerima manfaat (PM). Salah satu upaya yang disebutkan oleh Informan 5 adalah pemantauan yang lebih intensif terhadap setiap PM agar mereka tetap konsisten mengikuti program rehabilitasi dengan baik. Dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bahwa fasilitas yang terbatas digunakan secara maksimal, PPS Mardi Utomo berusaha untuk memberikan dampak yang lebih cepat dan signifikan. Selain itu, Informan 4 menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan PM. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran dan memberikan PM kesempatan untuk mengembangkan keahlian yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah keluar dari panti. Hal ini juga sejalan dengan upaya PPS Mardi Utomo untuk menjaga agar setiap PM mendapatkan pengalaman pelatihan yang sesuai dengan kemampuan individu mereka, sehingga mereka lebih termotivasi dan cepat beradaptasi.

Upaya akselerasi lainnya yang dilakukan oleh PPS Mardi Utomo adalah melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak luar, termasuk lembaga keagamaan dan masyarakat sekitar. Informan 1 menjelaskan bahwa PPS Mardi Utomo telah menggandeng pesantren untuk memberikan pengajaran agama kepada PM secara sukarela. Meskipun ini dilakukan tanpa imbalan, pengajaran agama yang diberikan oleh para pengabdian pesantren

terbukti efektif dalam membantu membangun karakter dan motivasi PM untuk lebih giat mengikuti proses rehabilitasi. Kerjasama dengan pihak eksternal ini tidak hanya memperkaya materi rehabilitasi, tetapi juga memberikan variasi dalam metode pembelajaran yang bisa lebih menarik bagi PM. Di sisi lain, Informan 3 menambahkan bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi PM, mereka mencoba lebih banyak melibatkan aparat keamanan setempat, seperti babinkamtibmas, untuk memastikan agar PM yang tidak tertib tetap terjaga dan mengikuti program dengan lebih disiplin. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih teratur dan meminimalisir potensi ketidakdisiplinan di kalangan PM.

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Informan 2, PPS Mardi Utomo juga selalu berusaha untuk menyesuaikan pelayanan dengan dinamika yang ada, seperti hadirnya anak-anak yang turut dibawa oleh PM. Mereka memastikan agar kegiatan pelatihan keterampilan dapat tetap berjalan dengan baik meskipun ada anak-anak yang perlu diberi perhatian khusus. Dengan demikian, PPS Mardi Utomo berupaya untuk mempercepat proses rehabilitasi tanpa mengabaikan kebutuhan dasar lainnya. Semua upaya akselerasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa PM tidak hanya siap secara fisik dan keterampilan, tetapi juga siap secara mental dan sosial untuk reintegrasi ke masyarakat.

Selain itu, upaya menjalin kerja sama dengan Bhabinkamtibmas mencerminkan pendekatan Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), di mana lembaga sosial menggandeng aktor eksternal untuk memperkuat pelaksanaan program. Kolaborasi ini mampu memberikan penguatan dari sisi penegakan disiplin dan ketertiban terhadap penerima manfaat, khususnya dalam merespons pelanggaran aturan internal yang sering diabaikan jika hanya ditangani oleh pekerja sosial. Sementara itu, strategi spesialisasi pelatihan keterampilan juga menjadi langkah akseleratif yang baik karena memungkinkan penerima manfaat mengikuti pelatihan sesuai minat dan potensi mereka. Selain peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Meskipun terkendala motivasi penerima

manfaat yang minim, namun pelatihan dilakukan terfokus pada penerima manfaat yang benar-benar berminat. Dengan menyasar pelatihan hanya pada mereka yang benar-benar berminat, PPS Mardi Utomo mampu mempercepat proses pencapaian kemandirian penerima manfaat secara lebih terukur dan berkelanjutan.

### **3.3.2. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan peran Implementor**

Meskipun PPS Mardi Utomo telah berusaha keras untuk mengimplementasikan setiap aspek dari Permensos No. 16 Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya, mereka tetap menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program rehabilitasi. Salah satu kendala utama yang sering disorot oleh informan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Informan 5 menekankan bahwa jumlah staf yang terbatas, hanya 24 orang, membuat pengelolaan dan pengawasan terhadap banyaknya penerima manfaat (PM) menjadi sangat sulit. Terlebih lagi, banyaknya PM yang membutuhkan perhatian intensif, ditambah dengan hadirnya anak-anak dari beberapa PM, menjadikan proses rehabilitasi semakin kompleks. Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada sulitnya melakukan pendekatan personal dan memastikan setiap PM mendapatkan perhatian yang cukup dalam menjalani program-program rehabilitasi yang ada.

Selain itu, masalah anggaran juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program. Informan 4 mengungkapkan bahwa biaya untuk pelatihan keterampilan yang memadai, seperti pelatihan tata boga, memerlukan alat dan bahan yang tidak sedikit, namun seringkali anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan beberapa program, terutama yang melibatkan keterampilan praktis, tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kualitas bimbingan yang bisa diberikan, serta kemampuan PPS Mardi Utomo untuk menyediakan fasilitas pelatihan yang lebih lengkap dan efektif. Padahal, pelatihan keterampilan yang berkualitas sangat diperlukan untuk membantu PM memiliki keahlian yang dapat menunjang kehidupan mereka setelah keluar dari

panti.

Kendala lain yang turut menghambat proses rehabilitasi adalah rendahnya motivasi dari beberapa PM untuk menjalani program dengan baik. Informan 3 dan Informan 5 sama-sama mencatat bahwa meskipun program-program telah disediakan dan dilaksanakan dengan baik, beberapa PM tidak memiliki kesadaran atau keinginan untuk berubah. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk tinggal lebih lama di panti, menjadikan PPS Mardi Utomo sebagai tempat tinggal tetap, meskipun seharusnya mereka sudah siap reintegrasi ke masyarakat setelah masa rehabilitasi selesai. Motivasi yang rendah ini, ditambah dengan kurangnya disiplin, membuat mereka sulit untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan yang diberikan. Bahkan, beberapa PM sulit untuk diajak berkoordinasi dan membutuhkan dorongan ekstra agar bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh PPS Mardi Utomo. Dengan demikian, meskipun PPS Mardi Utomo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, keberhasilan implementasi program rehabilitasi sangat bergantung pada kesiapan dan motivasi dari para PM itu sendiri.

Kendala lain yang cukup menantang adalah tidak adanya identitas lengkap dari penerima manfaat. Kondisi ini menyulitkan ketika PM mengalami sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit, karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan layanan medis tanpa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Padahal secara perencanaan, pihak lembaga bertanggung jawab untuk memastikan setiap PM mendapatkan perawatan yang layak. Di lapangan, proses rujukan sering kali terkendala oleh birokrasi yang kompleks, memerlukan berbagai surat pengantar dan perjanjian, serta memakan waktu yang cukup lama. Berikut tabel kendala yang dialami oleh PPS Mardi Utomo dalam melaksanakan Peran sebagai Implementor:

**.Tabel 3.3 Kendala dalam melaksanakan Peran sebagai Implementor**

| <b>Kendala</b> | <b>Sub-gejala</b>  | <b>Keterangan</b>                                                     |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Internal       | Jumlah SDM sedikit | Dengan jumlah penerima manfaat yang banyak, kegiatan padat karya yang |

|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    | berbagai macam, jumlah SDM atau pekerja sosial yang menjalankan program rehabilitasi sangatlah kurang. Total 24 orang yang bekerja di PPS Mardi Utomo dan 12 orang di bidang Rehabsos.                                                              |
|           | Keterbatasan Anggaran                              | Beberapa fasilitas dan alat-alat penunjang pelatihan keterampilan dirasa sudah tidak baik dan aus, namun efisiensi anggaran terpaksa dilakukan hingga alat-alat penunjang pelatihan keterampilan tidak segera diperbaharui.                         |
| Eksternal | Realita sasaran kurang tepat                       | PGOT yang dilayani di PPS Mardi Utomo seharusnya adalah yang berusia produktif antara 18 hingga 60 tahun, namun pada realitanya beberapa PGOT menolak merujuk anaknya ke PPS dengan peruntukan yg sesuai krn tidak ingin dipisahkan dengan anaknya. |
|           | Kurangnya Motivasi dan Daya Juang Penerima manfaat | PGOT menemukan zona nyaman Ketika tinggal di PPS Mardi Utomo dimana mereka merasa hidupnya ditanggung dan tidak perlu berusaha sendiri, minimnya motivasi ini membuat para PGOT tidak berkembang pasca-rehab.                                       |
|           | Tidak adanya identitas Penerima Manfaat            | Seringkali penerima manfaat tidak memiliki KTP atau tanda pengenal lainnya, sehingga sulit mendapatkan hak sebagai warga negara, dibutuhkan birokrasi yang Panjang untuk mendapatkan data kependudukan penerima manfaat, sementara data             |

|  |  |                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  | ini dibutuhkan untuk rujukan ke fasilitas Kesehatan dan sekolah. |
|--|--|------------------------------------------------------------------|

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga rehabilitasi sosial, PPS Mardi Utomo menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang berdampak langsung pada efektivitas program rehabilitasi. Kendala internal terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah tenaga kerja yang tersedia di PPS Mardi Utomo terbilang minim dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah penerima manfaat yang ditangani. Dari total 24 orang pegawai, hanya 12 orang yang berada di bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos), padahal kegiatan yang dilaksanakan sangat beragam dan padat, mulai dari pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, hingga pengawasan kedisiplinan harian. Hal ini berdampak pada beban kerja yang tinggi, distribusi tugas yang tidak merata, serta potensi penurunan kualitas layanan rehabilitasi.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan besar dalam mendukung fasilitas dan alat penunjang pelatihan keterampilan. Sejumlah alat pelatihan sudah dalam kondisi aus dan tidak layak pakai, namun karena adanya efisiensi anggaran, pembaruan fasilitas tidak dapat segera dilakukan. Hal ini menurunkan efektivitas pelatihan keterampilan, padahal keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas pelatihan yang diberikan.

Di sisi lain, kendala eksternal muncul dari kondisi penerima manfaat serta faktor sosial yang lebih luas. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana PGOT yang seharusnya berada dalam rentang usia produktif (18–60 tahun) sering kali datang bersama anak-anaknya, dan enggan dirujuk ke lembaga yang sesuai karena tidak ingin dipisahkan dari anaknya. Hal ini mengganggu skema rehabilitasi yang seharusnya difokuskan pada kelompok usia produktif. Selain itu, rendahnya motivasi dan daya juang penerima manfaat menjadi hambatan signifikan. Banyak dari mereka merasa lebih nyaman hidup di dalam panti karena kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal telah terpenuhi, sehingga mereka tidak

terdorong untuk mandiri dan berkembang setelah masa rehabilitasi berakhir. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan motivasional dan pemberdayaan yang lebih kuat selama program rehabilitasi berlangsung.

Masalah lainnya adalah tidak adanya identitas kependudukan pada banyak penerima manfaat. Ketiadaan KTP atau dokumen resmi lainnya menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial lainnya. Proses untuk mendapatkan kembali data kependudukan ini membutuhkan birokrasi yang panjang, padahal data tersebut merupakan syarat penting untuk merujuk mereka ke fasilitas-fasilitas layanan dasar. Tanpa identitas, hak-hak sipil penerima manfaat menjadi terhambat, dan proses reintegrasi mereka ke masyarakat berjalan lebih lambat.

Dengan demikian, meskipun PPS Mardi Utomo telah melaksanakan perannya secara optimal, berbagai kendala struktural dan sosial ini tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor dan dukungan kebijakan yang lebih adaptif.

